STRATEGI PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

Reinaldy Novanka Nugraha
NPP : 33.0576
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email : aldynovanka@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Timoty Yusuf Salama, S.STP, M.Tr.IP
Email : Tijiyusufsalama@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): Previous studies on the development and supervision of community organizations (Ormas) by the National Unity and Political Agency (Bakesbangpol) generally viewed Ormas as homogeneous entities and applied a one-size-fits-all development approach. In fact, each Ormas sector has different characteristics, capacities, and development needs. In Mojokerto City, the increasing number of Ormas is also not balanced by good organizational governance, active participation, and administrative compliance, resulting in various social and institutional problems. **Purpose:** This study aims to analyze the development strategy of community organizations implemented by Bakesbangpol in Mojokerto City based on the characteristics of Ormas sectors and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. **Method**: This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The analysis applies Talcott Parsons' AGIL theory combined with SWOT analysis to examine adaptation, goal attainment, integration, and latency in the development strategy of Ormas. **Result:** The study found that the development strategy implemented by Bakesbangpol has not been fully optimal. In the adaptation dimension, development programs have not entirely adjusted to the diverse characteristics of Ormas. In the goal attainment dimension, programs have been implemented but participation remains uneven. In the integration dimension, coordination among stakeholders and Ormas is still weak. In the latency dimension, the internalization of national values and organizational commitment has not been consistently maintained. Supporting factors include institutional commitment and regulatory support, while inhibiting factors consist of limited budget, human resources, and low administrative awareness among Ormas. **Conclusion:** This study concludes that the development strategy of Ormas by Bakesbangpol Mojokerto City requires a more adaptive and differentiated approach based on the characteristics of each Ormas sector. Strengthening coordination, participation, and institutional capacity is necessary to create effective, sustainable, and targeted development programs that support social stability and regional development.

Keywords: AGIL Theory, Community Organizations (Ormas), Development Strategy, National Unity and Political Agency (Bakesbangpol), SWOT Analysis

ABSTRAK

Permasalahan (*Research Gap*): Penulis berfokus pada permasalahan masih banyaknya organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum tertib administrasi, rendahnya partisipasi aktif Ormas dalam kegiatan pembinaan, serta adanya penyimpangan fungsi Ormas yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial. Selain itu, penelitian terdahulu masih cenderung memandang Ormas sebagai entitas yang homogen sehingga strategi pembinaan yang diterapkan bersifat umum dan belum mempertimbangkan karakteristik tiap bidang Ormas. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto berdasarkan karakteristik bidang organisasi kemasyarakatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori AGIL Talcott Parsons yang dipadukan dengan analisis SWOT. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pembinaan Ormas oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto memiliki tingkat efektivitas yang berbeda pada setiap dimensi AGIL. Pada dimensi adaptasi, pembinaan belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik masing-masing bidang Ormas sehingga partisipasi masih belum merata. Pada dimensi pencapaian tujuan, program pembinaan telah terlaksana namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan rendahnya keterlibatan sebagian Ormas. Pada dimensi integrasi, koordinasi antara pemerintah dan Ormas telah berjalan tetapi masih ditemukan lemahnya sinergi lintas sektor. Sementara itu, pada dimensi latency, penanaman nilai kebangsaan dan komitmen organisasi telah dilakukan melalui kegiatan pembinaan, namun keberlanjutan implementasinya belum konsisten di seluruh Ormas. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto belum berjalan optimal dan memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih adaptif serta sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang Ormas.

Kata kunci: AGIL; Bakesbangpol; Organisasi Kemasyarakatan; Strategi Pembinaan; SWOT.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan daerah. Keberadaan Ormas memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta mendukung stabilitas sosial. Namun, peningkatan jumlah Ormas di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas tata kelola organisasi yang baik. Masih terdapat Ormas yang belum tertib administrasi, rendah partisipasi dalam kegiatan pembinaan, hingga adanya penyimpangan fungsi organisasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kota Mojokerto sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur juga mengalami perkembangan jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang cukup pesat. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto tahun 2025, terdapat 118 Ormas terdaftar, namun hanya sekitar 50 organisasi yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan dan forum diskusi Ormas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan Ormas dalam kegiatan pembinaan masih belum optimal.

Selain itu, keberagaman bidang Ormas seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan kepemudaan menunjukkan bahwa setiap organisasi memiliki karakteristik dan kebutuhan pembinaan yang berbeda. Dalam praktiknya, strategi pembinaan yang dilakukan masih cenderung bersifat umum sehingga belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan masing-masing bidang organisasi. Menurut Gasper Liauw (2015), keberhasilan administrasi pembangunan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pembinaan, koordinasi, dan penyesuaian kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat sasaran.

Dalam konteks tersebut, Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila dan mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan yang lebih adaptif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing Ormas agar pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pembinaan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur".

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penelitian terdahulu mengenai pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam. Andrews *et al.* (2009) mengkaji hubungan antara strategi organisasi dan kinerja pelayanan publik, namun penelitiannya berfokus pada organisasi sektor publik dan tidak secara spesifik membahas pembinaan Ormas oleh pemerintah daerah. Rusfiana dan Kurniasih (2024) meneliti peran *civil society organizations* dalam mendorong perubahan sosial dan politik di Indonesia, namun kajiannya lebih menekankan pada fungsi advokasi dan partisipasi politik ketimbang strategi pembinaan yang dilakukan pemerintah. Rahman *et al.* (2023) membahas peran Ormas dan LSM dalam pembangunan berkelanjutan, namun belum menganalisis strategi pembinaan berdasarkan karakteristik bidang organisasi.

Keterbatasan utama penelitian terdahulu terletak pada kecenderungan memandang Ormas sebagai entitas yang homogen sehingga strategi pembinaan yang direkomendasikan bersifat umum dan tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik, kapasitas, dan kebutuhan masing-masing bidang Ormas. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengintegrasikan teori AGIL Talcott Parsons dengan analisis SWOT untuk mengkaji strategi pembinaan Ormas pada tingkat pemerintah daerah.

Kesenjangan penelitian yang masih ada adalah minimnya kajian empiris mengenai strategi pembinaan Ormas yang bersifat adaptif dan diferensiatif berdasarkan karakteristik bidang organisasi. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi pembinaan Ormas oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto menggunakan pendekatan teori AGIL yang dipadukan dengan analisis SWOT, serta memberikan rekomendasi pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang Ormas.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah. Di Kota Mojokerto, jumlah Ormas yang terus meningkat belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas tata kelola organisasi, kepatuhan administratif, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam melaksanakan fungsi pembinaan secara efektif dan tepat sasaran.

Penelitian ini juga penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai strategi pembinaan Ormas yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto berdasarkan karakteristik bidang organisasi. Melalui penelitian ini, pemerintah daerah dapat memperoleh dasar analisis dalam merumuskan strategi pembinaan yang lebih adaptif, diferensiatif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi masyarakat di lapangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian mengenai pembinaan Ormas melalui pendekatan teori AGIL dan analisis SWOT.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan mengalami keterbatasan data empiris dalam memahami efektivitas strategi pembinaan Ormas yang selama ini dilaksanakan. Akibatnya, kebijakan pembinaan berisiko tetap bersifat umum, kurang efektif, dan tidak mampu menjawab perbedaan karakteristik masing-masing Ormas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya partisipasi organisasi, lemahnya koordinasi antara pemerintah dan Ormas, serta meningkatnya potensi penyimpangan fungsi organisasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan daerah.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas strategi organisasi, tata kelola organisasi masyarakat sipil, partisipasi masyarakat, serta hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai organisasi masyarakat memiliki variasi fokus, metode, dan pendekatan teoritis yang digunakan.

Rhys Andrews dkk. meneliti hubungan antara sentralisasi organisasi, strategi organisasi, dan kinerja pelayanan publik menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *organizational strategy and public service performance*, yang berfokus pada organisasi sektor publik dan kinerja pelayanan publik (Andrews et al., 2009). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan.

Penelitian mengenai *The Role of Community Engagement as Corruption Control Strategy in Local Governments: Insights from Indonesia* mengkaji keterlibatan masyarakat sebagai strategi pengendalian korupsi di pemerintah daerah menggunakan pendekatan *governance* dan *community engagement*. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Srirejeki & Khairurrizqo, 2025)

Yudi Rusfiana dan Dewi Kurniasih meneliti peran *Civil Society Organizations* (CSOs) dalam mendorong perubahan sosial dan politik di Indonesia menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *civil society and democratic governance*, yang berfokus pada strategi advokasi organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah (Rusfiana et al., 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam membangun demokrasi dan mendorong perubahan kebijakan publik.

Penelitian *Understanding the Microfoundations of Government–Civil Society Relations* membahas hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam pelayanan publik menggunakan pendekatan *institutional work.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pemerintah dan organisasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, namun juga memengaruhi identitas dan pola kerja organisasi masyarakat. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas hubungan pemerintah dengan organisasi masyarakat dalam konteks pembinaan dan tata kelola organisasi. (Waardenburg, 2021)

Penelitian *Reorientation of Policy and Governance for Civil Society Organizations to Facilitate People's Political Participation* membahas reorientasi kebijakan dan tata kelola organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam proses demokrasi. Hasil penelitian menekankan perlunya kebijakan dan strategi tata kelola yang lebih adaptif agar organisasi masyarakat dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung partisipasi publik dan pembangunan demokrasi. (Putri, 2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Sadu Wasistiono, Muhammad Irwan Tahir, dan rekan-rekan membahas peran Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa Ormas berperan sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pembangunan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan kapasitas organisasi melalui pembinaan yang berkelanjutan. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas organisasi kemasyarakatan, namun penelitian penulis lebih menitikberatkan pada strategi pembinaan Ormas oleh pemerintah daerah melalui Bakesbangpol (Rahman et al., 2023).

Tanti Dewi Andriani dan Sudarsana (2018) dalam penelitian berjudul *Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan dalam Mewujudkan Good Governance* menggunakan metode kualitatif dengan teori AGIL untuk menganalisis kinerja DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD tergolong baik dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, meskipun masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti perbedaan ideologi, keterbatasan waktu, dan tingginya ekspektasi masyarakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan teori AGIL, namun berbeda pada objek penelitian, yaitu strategi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto.

Teddy Asmara (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effectiveness of Gratification Arrangements as Part of Corruption Crimes* menggunakan teori AGIL Talcott Parsons untuk menganalisis efektivitas pengaturan gratifikasi dalam sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi

juga oleh keterkaitan antara subsistem ekonomi, politik, hukum, dan budaya dalam masyarakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan teori AGIL sebagai alat analisis, namun berbeda pada fokus kajian. Penelitian Teddy Asmara berfokus pada efektivitas pengaturan gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa persamaan dan perbedaan yang relevan dengan penelitian ini. Dari segi persamaan, seluruh penelitian terdahulu membahas organisasi kemasyarakatan atau *civil society organizations* dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Andrews *et al.* (2009), Rusfiana dan Kurniasih (2024), serta Waardenburg (2021) sama-sama mengkaji hubungan antara organisasi dan pemerintah dalam konteks pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.

Dari segi perbedaan, penelitian Andrews *et al.* (2009) berfokus pada organisasi sektor publik di negara maju, sedangkan penelitian ini berfokus pada Ormas di tingkat pemerintah daerah Indonesia. Penelitian Andriani dan Sudarsana (2018) serta Asmara (2021) menggunakan teori AGIL, namun objek kajiannya berbeda, yaitu kinerja DPRD dan efektivitas pengaturan gratifikasi. Penelitian ini menggunakan teori AGIL untuk menganalisis strategi pembinaan Ormas yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Kelemahan penelitian terdahulu terletak pada keterbatasan dalam mengembangkan strategi pembinaan yang diferensiatif berdasarkan karakteristik bidang Ormas. Sebagian besar penelitian masih memandang Ormas sebagai entitas homogen dan belum mengintegrasikan analisis SWOT dalam merumuskan strategi pembinaan. Penelitian ini memosisikan diri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi pembinaan Ormas oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto secara lebih komprehensif melalui pendekatan teori AGIL dan analisis SWOT.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang tidak hanya bersifat lokasional, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan konseptual dalam kajian pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. Secara teoritis, penelitian ini mengembangkan penerapan teori AGIL Talcott Parsons dalam konteks pembinaan Ormas oleh pemerintah daerah. Teori AGIL yang semula dikembangkan untuk menganalisis sistem sosial secara umum, dalam penelitian ini dioperasionalisasikan secara spesifik untuk menganalisis fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan nilai dalam strategi pembinaan Ormas.

Secara konseptual, penelitian ini mengusulkan pendekatan pembinaan diferensiatif *(differentiated guidance approach*) yang menekankan pentingnya menyesuaikan strategi pembinaan dengan karakteristik masing-masing bidang Ormas. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan pembinaan konvensional yang bersifat seragam dan tidak mempertimbangkan perbedaan kapasitas, kebutuhan, serta pola gerakan masing-masing organisasi.

Kontribusi metodologis penelitian ini terletak pada integrasi teori AGIL dengan analisis SWOT sebagai kerangka analisis yang komprehensif. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan peneliti tidak hanya menganalisis fungsi sistem pembinaan, tetapi juga

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi efektivitas strategi pembinaan Ormas.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Strategi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur berdasarkan karakteristik bidang organisasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis secara mendalam strategi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto berdasarkan karakteristik bidang organisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil pembinaan, tetapi juga pada proses, dinamika, hambatan, serta interaksi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan Ormas (Hasan, 2011). Dengan demikian, metode ini dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara purposive terhadap informan yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Mojokerto. Informan penelitian terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Organisasi Kemasyarakatan Kota Mojokerto sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembinaan Ormas, staf pelaksana pembinaan Ormas, serta beberapa pengurus Organisasi Kemasyarakatan dari bidang sosial, dan agama. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi pemerintah sebagai pelaksana pembinaan maupun dari Ormas sebagai objek pembinaan.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pihak pemerintah dan organisasi masyarakat, triangulasi teknik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan (Rahmah et al., 2022).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2014). Analisis penelitian menggunakan teori AGIL Talcott Parsons yang dipadukan dengan analisis SWOT (King et al., 2023), untuk menganalisis aspek adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan nilai dalam strategi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Desember hingga Januari, yang mencakup observasi awal, wawancara mendalam, serta

pengumpulan dokumen terkait pembinaan Ormas (Arikunto, 2010). Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi strategi pembinaan Ormas secara aktual dan sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

Pemilihan informan kunci dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipilih karena memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan kebijakan pembinaan Ormas di tingkat daerah serta memiliki penguasaan informasi yang komprehensif mengenai arah strategis pembinaan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan Ormas serta bertanggung jawab atas koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan. Staf pelaksana pembinaan Ormas dipilih karena memiliki pengalaman teknis dalam implementasi kegiatan pembinaan di lapangan dan berinteraksi langsung dengan pengurus Ormas. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan dari berbagai bidang dipilih karena merupakan pihak yang menjadi objek pembinaan sehingga dapat memberikan perspektif mengenai efektivitas, relevansi, dan kebutuhan pembinaan dari sudut pandang organisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto menggunakan teori AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori AGIL menjelaskan bahwa suatu sistem atau organisasi dapat berjalan secara efektif apabila mampu memenuhi empat fungsi utama, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainmen*t (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola atau nilai). Keempat fungsi tersebut digunakan untuk menganalisis strategi pembinaan Ormas yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, partisipasi, dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 *Adaptation* (Adaptasi)

Adaptasi menunjukkan kemampuan Bakesbangpol Kota Mojokerto dalam menyesuaikan strategi pembinaan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam konteks pembinaan Ormas, adaptasi menjadi penting karena setiap organisasi memiliki karakteristik, bidang kegiatan, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan sangat ditentukan oleh kemampuan Bakesbangpol dalam memahami kondisi Ormas yang menjadi sasaran pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Bakesbangpol Kota Mojokerto telah melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan seperti sosialisasi regulasi organisasi kemasyarakatan, pembinaan administrasi, forum komunikasi Ormas, serta fasilitasi kegiatan organisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan Ormas agar mampu menjalankan fungsi dan perannya di masyarakat.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik yang menyatakan bahwa:

"Kami memberikan pembinaan kepada seluruh Ormas yang terdaftar, namun karena keterbatasan sumber daya dan banyaknya jenis organisasi, materi pembinaan yang diberikan masih bersifat umum."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bakesbangpol telah berupaya melakukan pembinaan kepada seluruh Ormas tanpa membedakan bidang organisasi. Akan tetapi, kondisi tersebut menyebabkan materi pembinaan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa Ormas bidang pendidikan lebih membutuhkan pembinaan terkait pengembangan program pendidikan masyarakat, sedangkan Ormas bidang sosial lebih membutuhkan penguatan kerja sama dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Sementara itu, Ormas kepemudaan cenderung membutuhkan pembinaan mengenai pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan organisasi.

Selain itu, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa jumlah Ormas yang terdaftar di Kota Mojokerto cukup beragam dari segi bidang dan skala organisasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bakesbangpol dalam menyusun strategi pembinaan yang mampu menjangkau seluruh kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, meskipun program pembinaan telah berjalan secara rutin, masih diperlukan penyesuaian strategi agar pembinaan yang diberikan lebih adaptif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing Ormas.

3.*2 Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Pencapaian tujuan berkaitan dengan kemampuan Bakesbangpol dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam program pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan pembinaan yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi, peningkatan kepatuhan administrasi, penguatan wawasan kebangsaan, serta peningkatan partisipasi Ormas dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga stabilitas sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, Bakesbangpol telah menyusun berbagai program pembinaan yang dilaksanakan setiap tahun. Program tersebut meliputi sosialisasi regulasi, pembinaan administrasi organisasi, forum komunikasi Ormas, serta kegiatan wawasan kebangsaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman organisasi terhadap peraturan yang berlaku dan memperkuat peran Ormas sebagai mitra pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pelaksana pembinaan Ormas diperoleh informasi bahwa:

"Program pembinaan telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditetapkan setiap tahun, tetapi tidak semua Ormas hadir dan mengikuti kegiatan secara aktif."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi pelaksanaan program, tujuan pembinaan telah diupayakan melalui berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian, tingkat kehadiran dan partisipasi Ormas dalam kegiatan pembinaan masih belum optimal. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa jumlah organisasi yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan masih lebih sedikit dibandingkan jumlah organisasi yang terdaftar secara resmi di Bakesbangpol Kota Mojokerto.

Hasil wawancara dengan beberapa pengurus Ormas juga menunjukkan bahwa terdapat organisasi yang mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan waktu sehingga tidak selalu dapat mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya hasil pembinaan yang diterima oleh seluruh organisasi. Dengan demikian, tujuan pembinaan telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan, namun tingkat pencapaiannya masih perlu ditingkatkan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh Ormas.

3.3 *Integration* (Integrasi)

Integrasi menunjukkan kemampuan Bakesbangpol dalam membangun hubungan, koordinasi, dan kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan serta berbagai pihak terkait. Dalam pelaksanaan pembinaan, integrasi menjadi faktor penting karena keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif organisasi masyarakat sebagai mitra pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, Bakesbangpol Kota Mojokerto telah berupaya membangun komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan melalui forum komunikasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan Ormas. Forum tersebut menjadi sarana bagi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk bertukar informasi, menyampaikan aspirasi, serta membahas berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi.

Salah satu pengurus Ormas menyampaikan bahwa:

> *"Melalui forum yang diselenggarakan Bakesbangpol, kami bisa menyampaikan aspirasi dan berdiskusi dengan organisasi lain maupun pemerintah daerah."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa forum komunikasi yang diselenggarakan Bakesbangpol memberikan ruang bagi Ormas untuk terlibat dalam proses komunikasi dengan pemerintah daerah. Selain sebagai sarana penyampaian informasi, forum tersebut juga berfungsi untuk memperkuat hubungan antara organisasi masyarakat dengan pemerintah.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa tidak seluruh Organisasi Kemasyarakatan aktif mengikuti forum koordinasi yang diselenggarakan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi organisasi dalam setiap kegiatan masih berbeda-beda. Beberapa organisasi terlihat aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, sedangkan sebagian lainnya hanya hadir pada kegiatan tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses integrasi telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan seluruh Organisasi Kemasyarakatan agar hubungan kerja sama yang terbangun dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.*4 Latency* (Pemeliharaan Nilai)

Latency atau pemeliharaan nilai merupakan kemampuan Bakesbangpol dalam menjaga, menanamkan, dan mempertahankan nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam penelitian ini, nilai yang dimaksud meliputi nilai kebangsaan, nilai

Pancasila, persatuan dan kesatuan, serta komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Bakesbangpol secara rutin melaksanakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, pendidikan politik, serta pembinaan mengenai peran dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman organisasi mengenai pentingnya menjaga persatuan dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Menurut Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto :

> *"Kami selalu menekankan pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan menjalankan kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi organisasi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan komitmen organisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal ini penting mengingat Organisasi Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

Namun demikian, hasil wawancara dengan beberapa pengurus Ormas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut masih berbeda antar organisasi. Terdapat organisasi yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan dan menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dalam aktivitas organisasinya, tetapi terdapat pula organisasi yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembinaan sehingga pemahaman yang dimiliki masih terbatas.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi Ormas dalam kegiatan wawasan kebangsaan belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar nilai-nilai kebangsaan yang telah disampaikan dapat terus dipahami dan diterapkan dalam aktivitas organisasi maupun kehidupan bermasyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Andriani dan Sudarsana (2018) yang menunjukkan bahwa dimensi AGIL dapat digunakan untuk menganalisis kinerja lembaga pemerintahan. Namun demikian, terdapat perbedaan konteks di mana penelitian ini berfokus pada pembinaan Ormas yang melibatkan hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat, bukan kinerja internal lembaga. Penelitian ini juga mengonfirmasi temuan Waardenburg (2021) bahwa hubungan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dipengaruhi oleh pola kerja institusional yang dapat memengaruhi identitas dan efektivitas organisasi.

Berbeda dengan penelitian Rusfiana dan Kurniasih (2024) yang menekankan peran advokasi organisasi masyarakat sipil, penelitian ini menemukan bahwa Ormas di Kota Mojokerto lebih banyak berperan sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah ketimbang sebagai aktor advokasi politik. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh konteks daerah dan karakteristik bidang Ormas yang dominan di Kota Mojokerto.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan mengenai strategi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan dimensi AGIL, penelitian ini menemukan beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembinaan Ormas di Kota Mojokerto. Salah satu temuan menarik adalah adanya komitmen yang cukup kuat dari Bakesbangpol Kota Mojokerto dalam melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan sosialisasi, forum komunikasi, fasilitasi kegiatan organisasi, serta pembinaan wawasan kebangsaan yang dilakukan secara rutin kepada Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar.

Temuan lainnya adalah adanya dukungan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan pembinaan Ormas. Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Dukungan regulasi tersebut juga memudahkan Bakesbangpol dalam menyusun program pembinaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan Ormas. Jumlah organisasi yang cukup banyak tidak sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas sumber daya yang tersedia sehingga pelaksanaan pembinaan belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan organisasi secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya intensitas pembinaan yang diterima oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan.

Selain itu, tingkat kesadaran administratif dan partisipasi Ormas juga masih beragam. Beberapa organisasi telah aktif mengikuti kegiatan pembinaan dan memenuhi kewajiban administrasi, namun terdapat pula organisasi yang kurang aktif dalam mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Perbedaan tingkat partisipasi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Mojokerto.

Temuan menarik lainnya adalah besarnya potensi kemitraan antara pemerintah daerah dan Organisasi Kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan daerah. Beragamnya bidang kegiatan Ormas, seperti sosial, pendidikan, keagamaan, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat, menunjukkan bahwa Ormas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat stabilitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan pola pembinaan yang lebih adaptif dan kolaboratif agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain faktor-faktor yang telah diidentifikasi, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor lain yang memengaruhi keberhasilan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Mojokerto. Pertama, tingkat pendidikan pengurus organisasi berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam memahami materi pembinaan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan organisasi. Kedua, regenerasi kepengurusan menjadi tantangan bagi beberapa Ormas yang mengalami stagnasi kepemimpinan sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, kapasitas digital organisasi memengaruhi kemampuan Ormas dalam mengakses informasi, mengikuti kegiatan pembinaan daring, dan melaporkan kegiatan organisasi secara elektronik. Keempat, ketersediaan sekretariat menjadi indikator keberlanjutan organisasi karena organisasi yang memiliki sekretariat tetap cenderung lebih aktif dalam kegiatan pembinaan. Kelima, legalitas organisasi berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) memengaruhi tingkat kepatuhan administratif dan akses organisasi terhadap program pemerintah.

Keenam, kualitas kepemimpinan internal menentukan kemampuan organisasi dalam memobilisasi anggota untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Ketujuh, intensitas komunikasi lintas organisasi memengaruhi pertukaran informasi dan praktik baik antar Ormas. Kedelapan, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dapat memengaruhi kemandirian organisasi dalam menjalankan kegiatan. Kesembilan, motivasi mengikuti pembinaan bervariasi antar organisasi, ada yang bersifat substantif untuk meningkatkan kapasitas, ada pula yang bersifat administratif untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Kesepuluh, perubahan regulasi organisasi kemasyarakatan menuntut organisasi untuk terus beradaptasi dengan ketentuan baru yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan, seperti sosialisasi regulasi, pembinaan administrasi, forum komunikasi, dan penguatan wawasan kebangsaan. Berdasarkan analisis teori AGIL, strategi pembinaan telah berjalan pada aspek adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan nilai, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan tingkat partisipasi Ormas, keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya pembinaan sesuai karakteristik organisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang Ormas agar pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Guna meningkatkan efektivitas pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, disarankan agar Bakesbangpol Kota Mojokerto mengembangkan pola pembinaan yang lebih diferensiatif berdasarkan bidang kegiatan Ormas, memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan organisasi yang belum aktif, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat serta keterbatasan dalam menjangkau seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kota Mojokerto. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada pembinaan Ormas oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi pembinaan Ormas secara menyeluruh pada daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*)

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk memperdalam kajian mengenai pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. Penelitian selanjutnya disarankan dapat dilakukan pada wilayah yang lebih luas atau menggunakan

pendekatan yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pembinaan Ormas serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan stabilitas sosial masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andrews, R., Boyne, G. A., Law, J., & Walker, R. M. (2009). Centralization, organizational strategy, and public service performance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 19*(1), 57–80. https://doi.org/10.1093/jopart/mum039

Andriani, T. D., & Sudarsana, S. (2018). Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan periode 2016 dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Grobogan: Studi analisis fungsionalisme struktural "AGIL" tentang kinerja DPRD Kabupaten Grobogan periode 2016 bidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam mewujudkan good governance. *Journal of Development and Social Change, 1*(1), 65–75. https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/20742

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.

Asmara, T. (2021). The effectiveness of gratification arrangements as part of corruption crimes in Indonesia: A theoretical study in Talcott Parsons perspective. *International Journal of Criminology and Sociology, 10*, 906–911. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.107

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto. (2024a). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024*. Pemerintah Kota Mojokerto. https://ppid.mojokertokota.go.id/informasi_publik/14/badan-kesatuan-bangsa-politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto. (2024b). *Rencana strategis tahun 2024–2029*. Pemerintah Kota Mojokerto. https://ppid.mojokertokota.go.id/informasi_publik/14/badan-kesatuan-bangsa-politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto. (2025). *Data organisasi kemasyarakatan terdaftar tahun 2025*. Pemerintah Kota Mojokerto. https://ppid.mojokertokota.go.id/informasi_publik/14/badan-kesatuan-bangsa-politik

Hasan, E. (2011). *Filsafat ilmu dan metodologi penelitian ilmu pemerintahan*. Ghalia Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/111414/permendagri-no-57-tahun-2017

King, T., Freyn, S., & Morrison, J. (2023). SWOT analysis problems and solutions: Practitioners' feedback into the ongoing academic debate. *Journal of Intelligence Studies in Business, 13*(1), 30–42. https://doi.org/10.37380/jisib.v13i1.989

Liauw, G. (2015). *Administrasi pembangunan: Studi kajian PKL*. Refika Aditama.

Putri, N. E. (2025). Reorientation of policy and governance for civil society organizations to facilitate people's political participation. *Jurnal Kajian Konstitusi, 5*(2), 263–284. https://jkk.jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK/article/view/53692/15741

Rahmah, M., Ekowati, M., Nalien, E. M., Praja, S. J., Saribulan, N., Wulandari, S., & Rahman, H. (2022). *Metodologi penelitian terapan*. Penerbit Widina.

Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business, 7*(2), 1461–1471. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5779

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5779

Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The role of civil society organizations in promoting social and political change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies, 11*(3), 187–206. https://doi.org/10.29333/ejecs/2154

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

Srirejeki, K., & Khairurrizqo, K. (2025). The role of community engagement as corruption control strategy in local governments: Insights from Indonesia. *International Journal of Public Sector Management, 38*(7), 872–894. https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2024-0407

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Waardenburg, M. (2021). Understanding the microfoundations of government–civil society relations. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 32*(3), 548–560. https://doi.org/10.1007/s11266-020-00221-w